

ABSTRAK

Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta Notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kekuatan hukum inilah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya. Salah satu kendala terbesar bagi perkembangan koperasi adalah kurang akuratnya kedudukan hukum koperasi, dalam hal pemberian badan hukum, wewenang untuk memberikan badan hukum koperasi adalah Menteri Koperasi

Metode Penelitian yang digunakan ini berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya, Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *wawancara*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang. 2). Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang. 3). Hambatan dan Solusi dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan : 1) Pelaksanaan pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang yaitu dimulai dengan tahap persiapan pembentukan, tahap persiapan rapat pembentukan, tahap rapat pembentukan, tahap permohonan untuk mendapatkan pengesahan hak badan hukum Koperasi, dan tahap pengesahan akta pendirian. 2) Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang adalah sebagai pembuat akta pendirian badan usaha koperasi. Notaris mempunyai kewenangan hak / legal standing dalam membuat akta pendirian badan hukum koperasi. 3) Hambatan dan solusi dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang dari pihak koperasi adalah tingkat kesadaran anggota terhadap koperasi yang masih rendah, kemampuan manajerial yang kurang, dan terbatasnya sumber modal. Hambatan dari Notaris adalah masih banyak Notaris yang terbatas pengetahuannya tentang Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Hal ini menjadi tugas penting bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang agar lebih menekankan pentingnya sosialisasi terkait dengan SISMINBHKOP terus dilakukan kepada NPAK. Dengan keadaan masyarakat yang demikian, maka Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang perlu berupaya untuk membangun kerjasama antara Notaris di Kota Semarang dengan Badan Koperasi itu sendiri.

Kata Kunci : Peran dan Tanggung Jawab, Akta Notaris, Koperasi

ABSTRACT

The establishment of a cooperative is required or using a Notary deed with strong legal force. One of the biggest obstacles to the development of cooperatives is the lack of accurate legal standing of cooperatives, in terms of granting legal entities, the authority to grant cooperative legal entities is the Minister of Cooperatives.

The research method used is related to analysis and construction, which is carried out methodologically, systematically, and consistently through an empirical juridical approach, namely research that focuses on individual or community behavior in relation to the law. Researching the effectiveness of a law and research that wants to find a relationship (correlation) between various symptoms or variables as a data collection tool consists of document studies, observations (observations), and interviews (interviews). The specification of the research used is descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and their implementation practices. Types and sources of data used in this research are primary data collection conducted by interview method.

The purpose of this study is to analyze: 1) Implementation of the Deed of Establishment of Cooperatives in Semarang City. 2). The Role of the Notary as the Maker of the Deed of Establishment of a Cooperative Business Entity in the City of Semarang. 3). Barriers and Solutions in Making Cooperative Establishment Deeds in Semarang City

The results of the study concluded: 1) The implementation of the Deed of Establishment of Cooperatives in the City of Semarang, namely starting with the preparation stage for the formation, the preparation stage for the formation meeting, the formation meeting stage, the application stage to obtain the legalization of the legal entity rights of the Cooperative, and the ratification stage for the deed of establishment. 2) The role of the Notary as the Maker of the Deed of Establishment of the Cooperative Business Entity in the City of Semarang is as the maker of the deed of establishment of the Cooperative Business Entity. Notaries have the right / legal standing authority in making the deed of establishment of a cooperative legal entity. 3) Barriers and solutions in making the Deed of Establishment of Cooperatives in Semarang City from the cooperative side are the low level of awareness of members towards cooperatives, lack of managerial ability, and limited sources of capital. The obstacle for Notaries is that there are still many Notaries who have limited knowledge about Cooperative Deed Making Official Notaries . This is an important task for the Department of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Semarang City to further emphasize the importance of continuing to carry out socialization related to SISMINBHKOP to NPAK. With such a condition of society, the Office of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Semarang City needs to make efforts to build cooperation between Notaries in Semarang City and the Cooperative Board itself.

Keywords: Role. Responsibility. Notarial Deed. Cooperative